

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kinerja

#### 1. Pengertian Kinerja

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

Menurut Wibowo (2007:7) kinerja berasal dari pengertian penampilan (*performance*), ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kemudian dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Menurut Sulistio (2009: 43), kinerja organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja organisasi akan merujuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Mahsun (2006: 25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* (perencanaan strategi) suatu organisasi. Menurut Chaizi Nasucha (Sinambela, 2012: 186) kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Pasolong (2010: 175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya suatu tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Swanson (dalam Keban, 2004 : 193) Kinerja organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastuktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.

Menurut Bastian ( 2001:329) kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan, maka untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

Menurut Syamsul (2012: 8) kinerja adalah (*result*) yang merupakan *real value* (nilai nyata) bagi perusahaan. Untuk menghasilkan keluaran (*result*) tersebut dibutuhkan kompetensi tertentu, seperti kemampuan mengoperasikan, kemampuan mengatur sumber daya, dan lain lain. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut..

## **2. Tujuan Kinerja**

Menurut Wibowo (2012: 41), kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan aspirasi. Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan penglarifikasi tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan kinerja merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan kinerja yaitu menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.

### **3. Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahsun (2006: 26) pengukuran kinerja adalah merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu mengenai apa yang terjadi bukan mengapa hal itu atau apa yang harus dilakukan.

Menurut Mahmudi (2010: 12) pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai suatu kesuksesan organisasi. Kemudian, dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Soedarmayanti (2007: 182), pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi. .

Menurut Adisasmita (2011: 91), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya, jika terdapat bukti bahwa indikator atau ukuran capaian sasaran terlaksana searah dengan misi yang telah direncanakan. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi atau instansi. Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi publik memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Menurut Wibisono (2006: 192), pengukuran kinerja pada dasarnya telah diterapkan di seluruh organisasi di dunia. Pengukuran kinerja tersebut seringkali hanya menjadi sebuah aktivitas rutin tanpa adanya penekanan untuk menindak lanjuti hasil pengukuran yang didapatkan. Hasil dari pengukuran kinerja pada hakikatnya hanya memberikan pandangan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan. Tetapi tidak memberikan arahan mengapa perbedaan itu terjadi dan lebih jauh lagi tidak secara otomatis memberikan jawaban atas seberapa bagus kinerja actual saat ini dan tidak memberikan alternatif perbaikan yang dilakukan. Oleh karena

itu, dapat dinyatakan bahwa pengukuran kinerja hanya merupakan titik awal untuk analisis lebih jauh.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program dari suatu organisasi bisa tercapai, tetapi pengukuran kinerja tidak memberikan alternatif perbaikan yang dilakukan maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja.

#### **4. Evaluasi Kinerja**

Menurut Umar (2005: 36) evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantaranya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Menurut Wibisono (2006: 193) evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja yang dibandingkan dengan rencana atau standar yang telah disepakati. Pada setiap pengukuran kinerja harus ditetapkan standar pencapaian sebagai sarana kaji banding dimana kaji banding dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Kaji banding internal dapat dilakukan terhadap kinerja terbaik yang pernah dicapai, rata-rata kinerja masa lalu pada periode tertentu, kinerja bagian lain dalam organisasi, standar teknis yang dipersyaratkan dan kinerja tahun

terakhir. Kaji banding secara eksternal dapat dilakukan terhadap persaingan langsung, organisasi lain yang memiliki operasi yang dapat diperbandingkan pada sektor tersebut dan pencapaiannya dari rata-rata industri terbaik. Sedangkan menurut Rasul (2000:20), evaluasi kinerja termasuk dalam komponen pengukuran kinerja selain penetapan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana atau standar yang disepakati dan dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi dalam memperbaiki kinerjanya serta dapat memberikan alternatif perbaikan yang dilakukan. Evaluasi terhadap kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam upaya melakukan pemeliharaan jalan yang akan datang.



## 5. Penilaian Kinerja

Pada suatu organisasi diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapainya atau sering disebut dengan kinerja. Penilaian kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Selain itu, kinerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan.

Menurut Henry Simamora (Yani, 2012: 117) penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu, sedangkan Hasibuan (Yani, 2012: 118) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kinerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas.

Menurut (Prihadi, 2004:124) Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk mempertinggi kerja personel dalam organisasi. Penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pada masa tertentu yang menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen.

Selain pengertian di atas, menurut Sondang (2009:168) penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang kinerja para pegawainya. Penilaian kinerja harus

dilakukan dengan baik karena akan sangat bermanfaat bagi organisasinya secara keseluruhan, bagi para atasan langsung dan bagi para pegawainya yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian penilaian kinerja menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan penilaian kinerja Menurut Sondang (2007: 168) penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupa memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya. Penilaian kinerja harus dilakukan dengan baik karena akan sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan, bagi para atasan langsung dan bagi para karyawan yang bersangkutan. Enam hal yang penting dipahami dalam penilaian kinerja ialah :

- 1) Kegunaan hasil penilaian kinerja;
- 2) Unsur-unsur penilaian kinerja;
- 3) Teknik penilaian kinerja masa lalu;
- 4) Kiat melaksanakan penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan;
- 5) Implikasi proses penilaian;
- 6) Umpan balik bagi satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi tersebut.

## **6. Model Pengukuran Kinerja**

Adapun model pengukuran kinerja menurut Dwiyanto (Pasolong, 2010:178) antara lain meliputi :

### 1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya mudah dipahami sebagai rasio antara input dan output. Produktivitas merupakan suatu tingkatan prestasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### 2) Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu sebagai indikator kinerja, responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan visi dan misinya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 3) Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat.

Selain itu model pengukuran kinerja sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan jalan, yang dapat diukur melalui:

1. Struktur Perkerasan Jalan
2. Bahu Jalan dan Fasilitas Pejalan Kaki
3. Fasilitas Drainase Jalan

Berdasarkan beberapa model pengukuran kinerja di atas, peneliti menggunakan model pengukuran kinerja yang kedua, alasan peneliti memilih indikator tersebut karena model pengukuran ini dirasa memiliki indikator yang cocok dan relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi.

## **B. Tinjauan tentang Infrastruktur Jalan**

### **1. Pengertian Infrastruktur**

Menurut Familoni (2004:16), menyebutkan bahwa infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional. Selanjutnya infrastruktur dibedakan menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukan. Menurut Familoni (2004:20) menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, sanitasi, kemudian juga termasuk pekerjaan umum seperti, jalan, kanal, bendungan, irigasi, dan drainase serta proyek seperti jalan kereta api, angkutan kota.

Menurut Purwoto dkk (2009:67), pemeliharaan infrastruktur jalan mempunyai beberapa manfaat yaitu :

- 1) Perubahan biaya relatif dari sarana transportasi tertentu terhadap sarana transportasi lainnya;
- 2) Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat;
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana transportasi;
- 4) Peningkatan kualitas perjalanan (waktu, kecepatan, kenyamanan dan peningkatan kualitas sarana infrastrukturnya);

- 5) Pengaruh pada tata guna lahan akibat migrasi antar daerah dan perubahan pola pemukiman;
- 6) Peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi timbulnya perubahan pola dan struktur masyarakat;
- 7) Perubahan demografis;
- 8) Perubahan perilaku operasional dunia setempat.

Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Infrastruktur merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

## **2. Pengertian Jalan**

Menurut Arthur Wignall (2003 : 12) secara sederhana jalan didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlakukannya izin khusus untuk itu. Dengan persyaratan ini jalan air (*waterway*) dapat juga disebut sebagai jalan raya. Jalan diklasifikasikan berdasarkan pengguna jalan maupun berdasarkan lembaga pengelolanya, seperti dewan daerah yang bertugas memeliharanya.

## **A. Berdasarkan Kelas Jalan**

### **1. Kelas Jalan I**

Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18000 milimeter, ukuran paling tinggi 4200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

### **2. Kelas Jalan II**

Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18000 milimeter, ukuran paling tinggi 4200 milimeter, dan muatan sumbu terberat delapan ton.

### **3. Kelas Jalan III**

Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9000 milimeter, ukuran paling tinggi 3500 milimeter, dan muatan sumbu terberat delapan ton.

### **4. Kelas Jalan Khusus**

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18000 milimeter, ukuran paling tinggi 4200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

## **B. Klasifikasi dan Fungsi Jalan**

Ada beberapa pengelompokan jalan menurut sistem, yaitu :

### 1. Sistem Jaringan Jalan Primer

Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah, yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota.

### 2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota.

### 3. Pusat-pusat Produksi

Pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk kawasan pemukiman dan kawasan lainnya.

### 4. Simpul Jasa Produksi

Pusat-pusat kegiatan pelayanan nasional, wilayah dan lokal.

## **C. Pengelompokan Jalan menurut Fungsi**

### 1. Jalan Arteri

Jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perjalanan jarak jauh;
- b. Kecepatan rata-rata tinggi;



- c. Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan memperhatikan kapasitas jalan masuk.

## 2. Jalan Kolektor

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri:

- a. Perjalanan jarak sedang;
- b. Kecepatan rata-rata sedang;
- c. Jumlah jalan masuk dibatasi;
- d. Jalan lokal

## 3. Jalan yang melayani angkutan lokal, dengan ciri-ciri:

- a. Perjalanan jarak dekat;
- b. Kecepatan rata-rata rendah;
- c. Jumlah jalan masuk dibatasi.

## 4. Jalan Lingkungan

Jalan yang melayani angkutan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perjalanan jarak pendek;
- b. Kecepatan rendah.

### **D. Pengelompokkan Jalan Menurut Status**

Pengelompokkan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa.

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan ini dibina oleh pemerintah pusat.
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan ini dibina oleh pemerintah daerah provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan ini dibina oleh pemerintah kabupaten.
4. Jalan kota, merupakan jalan umum sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota. Jalan ini dibina oleh pemerintah kota.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman didalam desa, serta jalan lingkungan. Jalan ini dibina Oleh pemerintah desa.

Jalan provinsi di Provinsi Lampung dapat dikatakan efektif dan memenuhi standar teknis pelayanan apabila diantaranya:

1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu :
  - a. Lebar jalan yaitu 6.00 m;
  - b. Lebar jembatan yaitu 9.00 m.
2. Kualitas jalan dan jembatan harus memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu :
  - a. Struktur jalan harus memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 ton);
  - b. Struktur jembatan harus memenuhi beban Ditjen Bina Marga.

Berdasarkan klasifikasi jalan di atas, jalan yang menjadi objek penelitian ini merupakan jalan provinsi, karena kewenangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukoharjo berada pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang menjadi lokasi penelitian.

### **3. Pemeliharaan Jalan**

Menurut Kondoatie (2003: 87), pemeliharaan jalan pada dasarnya pemeliharaan rutin (*routine*) dan berkala (*periodic*) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Pada kegiatan pemeliharaan jalan dapat dibagi tiga yaitu:

- a) Pemeliharaan Rutin (*Routine*): pemeliharaan berkala yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar tugasnya sebagai pekerja;
- b) Pemeliharaan Berkala (*Periodic*): pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin berfungsinya jalan dengan baik dan untuk memperpanjang umur jalan tersebut;
- c) Serta pemeliharaan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*)

Berdasarkan definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk memertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

a. Tujuan Pemeliharaan Jalan

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya. Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi

belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan.

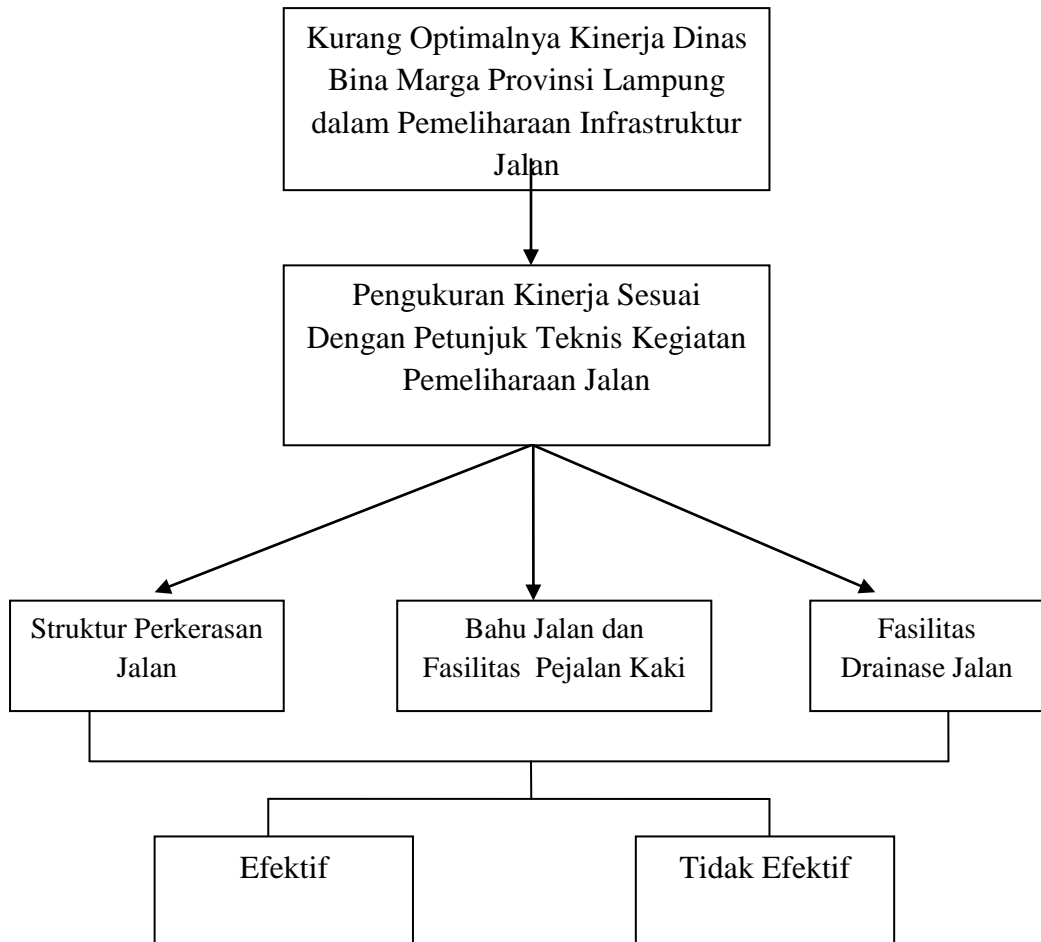
Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan secara berkala dengan melakukan pula peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Selain itupun, dilakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan. Baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur. Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera. Selain itupun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu yang selalu terjadi kerusakan berulang. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengembangan jaringan jalan yang telah mantap guna melayani lalu lintas transportasi darat dan daerah-daerah yang berkembang.

### **C.Kerangka Pikir**

Kondisi jalan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah, jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan bergelombang yang dapat membahayakan pengguna jalan tersebut. Upaya pemeliharaan jalan merupakan bentuk kinerja yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Untuk melihat sejauh mana kinerja Dinas Bina Marga tersebut, peneliti mengukur kinerja dengan menggunakan model pengukuran kinerja sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.

Melalui ketiga indikator tersebut akan diketahui kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukoharjo.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian